

PERAN PERHIMPUNAN INDONESIA DALAM PERGERAKAN INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAHIRNYA SUMPAAH PEMUDA TAHUN 1928

THE ROLE OF THE INDONESIAN ASSOCIATION IN THE INDONESIAN MOVEMENT AND ITS INFLUENCE ON THE BIRTH OF THE YOUTH PLEGE IN 1928

Agus Setiawan, Subaryana, Mardikun
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
IKIP PGRI Wates

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Perhimpunan Indonesia, 2) untuk mengetahui peran Perhimpunan Indonesia dalam pergerakan Indonesia, dan 3) mengetahui sejauhmana hubungan Perhimpunan Indonesia terhadap lahirnya Sumpah Pemuda. Metode yang digunakan dalam Penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode historis. Langkah-langkah sebagai berikut yaitu : pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber baik kritik ekstern maupun kritik intern (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan Penyusunan cerita masa lampau (historiografi). Berdasarkan hasil penelitian ini 1) Politik Kolonial Belanda yaitu Politik Etis atau Politik Balas Budi yang dipelopori Van Deventer adalah untuk mensejahterakan rakyat atas kerja keras orang Indonesia sehingga Pemerintahan Belanda semakin maju. Mulai saat itu didirikanlah sekolah-sekolah untuk orang Indonesia, dan para pelajar yang mampudapat meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi atau perguruan tinggi di Belanda. 2) Para pelajar di Belanda sering mengadakan pertemuan-pertemuan rutin guna bertukar pikiran dan temu kangen. Dari hal itu, akhirnya berdirikan perkumpulan yang diberi nama Indische Vereeniging. 3) Sejalan dengan pendidikan yang dilakukan, timbullah jiwa Cinta Tanah Air dan berkeinginan lepas dari penjajahan Belanda. Nama perkumpulan para pelajarpun diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Nama tersebut untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang ingin bersatu dan bebas dari penjajahan Belanda. Para pelajar baik di belanda maupun di Indonesia selalu aktif menyebarluaskan pentingnya persatuan dan kesatuan demi membentuk pemerintahan sendiri. Dari hal tersebut, muncullah pemikiran untuk menggabungkan semua perkumpulan demi mendorong tercapainya persatuan dan kesatuan. Maka, tidak lama kemudian dilaksanakan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II sehingga teretuslah Sumpah Pemuda.

Kata Kunci: *Perhimpunan Indonesia, Peran Perhimpunan Indonesia, Benang Merah Perhimpunan Indonesia dengan Sumpah Pemuda.*

ABSTRACT

The purpose of this research is 1) to find out the background to the formation of the Indonesian Association, 2) to find out the role of the Indonesian Association in the Indonesian movement, and 3) to find out the extent of the relationship between the Indonesian Association

and the birth of the Youth Pledge. The method used in preparing this thesis is the historical method. The following steps are: topic selection, source collection (heuristics), source criticism, both external criticism and internal criticism (verification), interpretation (interpretation), and compiling stories from the past (historiography). Based on the results of this research 1) Dutch Colonial Politics, namely Ethical Politics or Replied Budi Politics which was pioneered by Van Deventer, was to improve the welfare of the people due to the hard work of the Indonesian people so that the Dutch Government became more advanced. From then on, schools were established for Indonesians, and students who were able could continue to higher education or universities in the Netherlands. 2) Students in the Netherlands often hold regular meetings to exchange ideas and catch up. From this, finally an association was founded which was named *Indische Vereeniging*. 3) In line with the education carried out, a spirit of love for the country emerged and a desire to escape Dutch colonialism. The name of the students' association was changed to the Indonesian Association. This name shows the identity of the Indonesian people who want to be united and free from Dutch colonialism. Students both in the Netherlands and in Indonesia are always active in spreading the importance of unity and unity in order to form their own government. From this, the idea arose to combine all associations in order to encourage unity and unity. So, not long after, the First Youth Congress and the Second Youth Congress were held, resulting in the Youth Pledge.

Keywords: *Indonesian Association, Role of Indonesian Association, Red Thread of Indonesian Association with Youth Pledge.*

Latar Belakang

Rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda belum memiliki rasa kesadaran mengenai paham kekuasaan pemerintahan suatu negara. Rasa kesadaran itupun tidak serta merta didapat secara langsung dan bersama-sama. Berkat pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk putra-putra Indonesia maka, pelajar Indonesia dapat mempelajari tentang ilmu- ilmu pemerintahan dan cerita masa lampau perjuangan negara lain yang berusaha membebaskan diri dari penjajah sehingga, pengetahuan tentang kekuasaan pemerintahan suatu negara mulai dipelajari dan dipahami. Dari hal tersebut, rasa kesadaran dan cinta akan suatu negara sendiri pun mulai tumbuh dan berkembang di kalangan pelajar.

Demikian juga dengan para pelajar yang melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda, mereka merasa membutuhkan suatu wadah sebagai tempat bertemu dan saling bertukar informasi maka, terbentuklah perkumpulan dengan nama *Indische Vereeniging* yang kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia. Kondisi di Tanah Air lama kelamaan mengalami perubahan yang mendasar setelah mendapat seruan melalui majalah *Hindia Putra*. Para pelajar di Indonesia mendukung gagasan yang dianjurkan oleh tokoh

Perhimpunan Indonesia. Perkumpulan Pemuda ini memiliki tujuan yaitu Indonesia satu dan tidak dapat dibagi-bagi, selanjutnya mengambil suatu keputusan yang bersejarah dalam Kongres Pemuda dengan Ikrar Sumpah Pemuda (Mohammad Hatta, 1966: 11).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu : pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber baik kritik ekstern maupun kritik intern (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan Penyusunan cerita masa lampau (historiografi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Muncul dan Berkembangnya *Indische Vereeniging* di Belanda

1. Pelaksanaan Politik Etis Kolonial Belanda di Indonesia

Pelaksanaan *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa), Undang-undang Agraria dan Politik Pintu Terbuka oleh pemerintah Belanda bukan berarti penduduk pribumi menjadi sejahtera. Dengan masuknya bangsa asing yang mendirikan berbagai perusahaan dan perkebunan, maka orang pribumi pun tetap dijadikan sebagai tenaga kerja di pabrik-pabrik dan perkebunan dengan gaji yang murah (Sartono Kartodirdjo, 1999: 26). Tindakan pemerintahan Belanda ini mendapat banyak kritikan dari kaum liberal. Kritikan yang cukup mendapat sorotan dari pemerintah Belanda adalah kritikan *Van Deventer* yang ditulis dalam artikel dengan judul *Een eereschuld* (Suatu Hutang Kehormatan) yang diterbitkan dalam majalah *De Gids* pada tahun 1899, berisi tentang kemajuan dan keuntungan yang diperoleh pemerintah Belanda dari Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali dengan memberikan prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia (Ricklefs, 2007: 228).

Van Deventer menganjurkan program untuk kepentingan orang pribumi adalah dengan menyelenggarakan Trias Politika, yaitu irigasi dengan membangun saluran air untuk lahan pertanian dan perkebunan; transmigrasi dengan perpindahan penduduk ke luar Jawa untuk mengurangi kepadatan dan

untuk menjalankan pabrik serta perkebunan; dan pendidikan dengan membuka sekolah agar dapat membaca dan berhitung demi bekerja di pabrik dan perkebunan (Sartono Kartodirdjo, 1999: 32).

Kritikan *Van Deventer* akhirnya dapat menyentuh hati pemerintah Belanda. Kemudian, pemerintah Belanda menanggapi dengan mengemukakan gagasan pembaharuan yang tercermin dalam pidato Ratu Belanda pada tahun 1901 dengan judul *Ethische Richting* (haluan etika), sehingga disebut *Politik Etis* atau Politik Balas Budi (G. Moedjanto, 2001: 21). Dengan dikemukakannya pidato Ratu Belanda, akhirnya perjuangan yang dilakukan *Van Deventer* dapat terwujud dan program-program yang diutarakan pun dapat direalisasikan.

Politik *Etis* yang dijalankan pun mendapatkan hasil, tampak kemajuan yang lebih pesat dalam bidang pendidikan daripada sebelum *Politik Etis*. Sekolah-sekolah yang berorientasi Barat mulai marak didirikan seperti MULO (*Meer Uitgebried Lager Onderwijs*), AMS (*Algemeene Middelbare School*) yang terbuka bagi anak-anak pribumi dan menjadi pintu masuk ke universitas (S. Nasution, 1995: 18). Pendidikan sebenarnya sudah ada sebelum *Politik Etis* dijalankan namun, belum menjadi prioritas. Setelah *Politik Etis* disetujui oleh Ratu Belanda maka, pendidikan lebih diperhatikan dan terbuka bagi anak-anak pribumi.

2. Munculnya *Indische Vereeniging* di Belanda

Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah Belanda tentunya memberikan kesempatan bagi anak-anak pribumi untuk belajar. Anak-anak pribumi yang lulus pendidikan menengah atas dan mendapat nilai baik dapat meneruskan belajarnya di Belanda karena di tanah jajahan belum terdapat universitas atau perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta (Sudiyo, 1989: 21). Kendati sekolah-sekolah sudah didirikan namun, anak pribumi tetap kesulitan dalam melanjutkan belajarnya. Anak-anak pribumi harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, para orang tua yang anaknya belajar ke Belanda harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk biaya pendidikan kejenjang yang

lebih tinggi.

Para pelajar yang melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda merasa terasingkan karena jauh dari sanak saudara. Para pelajar tersebut merasa perlu suatu wahana untuk saling bertemu, saling bertukar informasi atau mengobrol demi mempererat rasa persaudaraan, maka pada tanggal 15 November 1908 didirikanlah suatu perkumpulan dengan nama *Indische Vereeniging* atau perkumpulan Hindia (Sudiyo, 2002: 24). Tentunya dengan perkumpulan ini para pelajar akan saling mengenal, lebih akrab dan rasa persaudaraan mereka akan lebih erat, serta tidak merasa kesepian.

B. Perhimpunan Indonesia Dalam Pergerakan Indonesia

1. Strategi Perjuangan Perhimpunan Indonesia di Bidang Sosial Budaya

Berdirinya suatu perkumpulan, dalam hal ini *Indiche Vereeniging* di Belanda tidak akan mudah dalam mempertahankannya, maka harus ada langkah untuk menghidupkan atau mengembangkannya. Dari hal ini, anggota *Indiche Vereeniging* menjalin hubungan dengan pemuka-pemuka dalam masyarakat Belanda yang memang bertujuan untuk membimbing para pelajar Indonesia dalam rangka *Politik Etis* (Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, 1977: 18). Langkah yang diambil anggota *Indiche Vereeniging* sangat tepat, karena jika tidak ada pemuka Belanda yang mendukung organisasi tersebut maka, akan sulit untuk bertahan dan berkembang. Pendekatan kepada pemuka Belanda tentunya tidak asal memilih, dipilih pemuka yang berkaitan dengan *Politik Etis* karena, salah satu tujuan *Politik Etis* adalah memajukan atau mengadakan pendidikan untuk orang Indonesia (S. Nasution, 1995: 16).

Berdirinya *Indiche Vereeniging* tentu memiliki program, baik untuk menambah jumlah sumber daya manusia maupun untuk meningkatkan kualitas tentang pengetahuan atau pengalaman sumber daya manusianya. Ketika mengadakan pertemuan untuk saling bertukar cerita, juga diadakan pidato tentang ilmu pengetahuan oleh pemuka Belanda yang mendukung kegiatan *Indiche Vereeniging*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo (1977: 18) bahwa “kegiatan *Indiche Vereeniging* adalah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan bagi anggotanya dan parapendukung Belanda, dalam pertemuan itu sering diadakan ceramah oleh ahli-ahli bangsa Belanda di bidang pengetahuannya”. Dengan ceramah yang diberikan oleh ahli Belanda, maka akan

menambah kualitas sumber daya manusianya, karena mendapat tambahan ilmu selain di Perguruan Tinggi.

2. Strategi Perjuangan Perhimpunan Indonesia di Bidang Politik

Suatu perkumpulan dapat mengalami perubahan haluan baik haluan sosial, haluan politik, haluan radikal, bergantung pada sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Perubahan haluan tersebut, tentu tidak mendadak atau langsung berubah namun, melalui proses yang cukup lama dan dipengaruhi oleh berbagai faktor atau peristiwa yang mendahuluinya. Faktor yang mempengaruhi perkumpulan *Indische Vereeniging* bersifat sosial menjadi sebuah perkumpulan bermuatan politik di antaranya dimulai dengan datangnya tiga tokoh *Indische Partij* yang dibuang atau diasingkan ke Belanda pada tahun 1913 karena melakukan gerakan politik di *Hindia Belanda* atau di Tanah Air, kemudian bergabung dengan *Indische Vereeniging* (G. Moedjanto, 2001: 45).

Para anggota Perhimpunan Indonesia pada masa kepengurusan Dr. Sukiman lebih banyak mempelajari tentang pergerakan kemerdekaan negara luar untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam tentang kemerdekaan suatu negara. Propaganda tentang perkembangan Indonesia lebih ditekankan lagi ke dunia internasional dengan mengikuti pertemuan-pertemuan kemudian berceramah atau pidato tentang Indonesia. Cita-cita Perhimpunan Indonesia sudah mengarah kemerdekaan Indonesia, untuk merealisasikan cita-cita tersebut aktivitas Perhimpunan Indonesia tidak hanya dilakukan di negeri Belanda saja, propaganda ke dunia internasional untuk memperlihatkan dan mencari dukungan usaha-usaha bangsa Indonesia.

Pada masa kepemimpinan Mohammad Hatta, beliau dengan terang-terangan menggunakan nama Indonesia dalam pidatonya, dan tidak lagi menyebut *Hindia Belanda*, sekalipun pada masa itu Indonesia masih dalam cengkeraman kekuasaan penjajahan Belanda. Dengan demikian Perhimpunan Indonesia-lah pertama kali, memberi arti kata politik dan ketatanegaraan, tentang nama Indonesia sebagai pengganti *Hindia Belanda* (Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, 1977: 24).

C. Benang Merah Perhimpunan Indonesia Dengan Sumpah pemuda

1. Munculnya Perkumpulan-Perkumpulan di Indonesia

Anggota Perhimpunan Indonesia yang telah menyelesaikan studinya di Belanda yang kemudian pulang ke Tanah Air sering mengadakan pertemuan atau hubungan satu sama lain, untuk mengenang kembali hari-hari mereka sebagai pelajar di negeri Belanda. Mereka mendirikan suatu perkumpulan baru. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan John Ingleson (1983: 20-21) bahwa Kelompok Studi Indonesia merupakan kelompok studi yang pertama, didirikan di Surabaya pada tanggal 11 Juli 1924, pendiri dan penggerak utamanya ialah Sutomo, seorang dokter di Surabaya yang sebelumnya seorang anggota Perhimpunan Indonesia yang aktif di Amsterdam tahun 1919 dan 1923. Kemudian pada November 1925, berdiri Kelompok Studi Umum di Bandung yang ketuanya adalah Iskaq Tjokroadisurjo seorang pengacara lulusan Perguruan Tinggi di Leiden yang telah lulus dari studi di negeri Belanda (John Ingleson, 1993: 42).

Seiring dengan perkembangan situasi saat itu, muncullah pemikiran untuk menyatukan organisasi-organisasi yang ada demi mencapai tujuan bersama. Menurut Soekarno yang juga pemimpin Kelompok Studi Umum, “hanya dengan massa aksi yang dipimpin oleh satu partai pelopor yang berjiwa nasional, maka pihak penjajah akan dapat dihadapi dan dimusnahkan. Oleh karena itu, perlu ada partai pelopor untuk memimpin rakyat” (Sudiyo, 1989: 108). Pemimpin Kelompok Studi Umum, mulai merencanakan organisasi baru yang dapat diterima oleh semua unsur yang ada. Dengan demikian, tidak lama kemudian rencana untuk mendirikan suatu partai pelopor dapat direalisasikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) (D.M.G Koch, 1951: 126).

2. Munculnya Semangat Nasionalisme

Pada tahun 1925 atas inisiatif Djaksodipuro, sejumlah mahasiswa *Technische Hoogesschool* dan *Rechtshoogesschool* berkumpul di Jakarta. Dalam pembicaraan yang diadakan, mereka berkesimpulan bahwa tugas mereka bukan

hanya untuk mencari ijazah tetapi juga harus ikut memikirkan soal-soal yang menyangkut kehidupan masyarakat. Hasil pertemuan pendahuluan ini kemudian dilanjutkan di Bandung dengan memanfaatkan kongres *Jong Java* dan *Jong Islamieten Bond*. Akhirnya pada tahun 1926 berdirilah suatu perkumpulan dengan nama Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) (Ahmadani G-Martha, Christianto Wibisono & Yozar Anwar, 1985: 98). PPPI kemudian mulai berhubungan dengan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia dalam waktu-waktu tertentu mengirimkan majalah Indonesia Merdeka ke Tanah Air yang berisi artikel-artikel tentang perjuangan-perjuangan Perhimpunan Indonesia di Belanda. PPPI mengirimkan majalah Indonesia Raya dan berita-berita penting ke negeri Belanda (Sudiyo, 1989: 114). Dengan demikian, PPPI ini sudah langsung mendapat pengaruh dari organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda, sehingga nama organisasi sudah memakai nama Indonesia.

Pada tanggal 15 November 1925 telah diadakan pertemuan dari beberapa organisasi pemuda untuk membentuk suatu kepanitiaan, sehingga terpilihlah ketua dan wakil ketua adalah M. Tabrani dan Sunarto dari *JongJava*, Djamaludin Adinegoro dari *Jong Sumatranen Bond* sebagai sekretaris dan Suwarso dari *Jong Java* sebagai bendahara, dan para anggotanya adalah Bahder Djohan dari *Jong Sumatranen Bond*, Jan Toule Soulehuway dari *Jong Ambon*, Paul Pinontoan dari *Pelajar Minahasa*, Hamami dari *Sekar Rukun*, Sanusi Pane dari *Jong Bataks* dan Sarbaini dari *Jong Sumatranen Bond*, sehingga pada 30 April 1926 dilaksanakan Kongres Pemuda Pertama (Kongres Pemuda I) (Sudiyo, 1989: 115).

Pelaksanaan Kongres Pemuda I ternyata masih belum sesuai dengan rencana yang diinginkan, pada tanggal 12 Agustus 1928 diadakan pertemuan yang dihadiri utusan-utusan dari *PPPI*, *Jong Java*, *Pemuda Indonesia*, *Jong Islamieten Bond*, *Jong Celebes*, *Jong Ambon*, *Jong BataksBond*, *Kaum Pemuda Betawi* sepakat membentuk panitia Kongres Pemuda II dengan Ketua Soegondo Djojopuspito dari *PPPI*, Djoko Marsait dari *Jong Java* sebagai wakil ketua, Moh. Yamin dari *Jong Sumatranen Bond* sebagai sekretaris, Amir Sjarifuddin dari

Jong Batak sebagai bendahara dan anggotanya adalah Djohan Muhamad dari *Jong Islamieten Bond*, Kotjosoengkono dari *Pemuda Indonesia*, Senduk dari *Jong Celebes*, Leimena dari *Jong Ambon*, dan Rohjani dari *Pemuda Betawi* dan akhirnya pada rapat yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 tercetuslah Sumpah Pemuda (Ahmadani G-Martha, Christianto Wibisono & Yozar Anwar, 1985: 116-118).

SIMPULAN

Pelaksanaan *Politik Kolonial* Belanda yaitu *Politik Etis* atau Politik BalasBudi yang dipelopori Van Deventer adalah untuk mensejahterakan rakyat atas kerja keras orang Indonesia. Mulai saat itu didirikanlah sekolah-sekolah untuk orang Indonesia, dan para pelajar yang mampu dapat meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi atau perguruan tinggi di Belanda. Para pelajar di Belanda sering mengadakan pertemuan-pertemuan rutin guna bertukar pikiran dan temu kangen. Dari hal itu, akhirnya berdirikan perkumpulan yang diberi nama *Indische Vereeniging*. Sejalan dengan pendidikan yang dilakukan, timbullah jiwa Cinta Tanah Air dan berkeinginan lepas dari penjajahan Belanda. Nama perkumpulan para pelajarpun diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Nama tersebut untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang ingin bersatu dan bebas dari penjajahan Belanda.

Para pelajar Indonesia di Belanda yang sedang menuntut ilmu, memiliki gagasan dan mencurahkan pemikiran tersebut melalui majalah *Indonesia Merdeka*. Majalah *Indonesia Merdeka* yang dikirim ke Indonesia, bertujuan untuk mempengaruhi para pelajar yang ada di Indonesia agar timbul pemikiran ingin bebas dari penjajahan dan memiliki rasa cinta Tanah Air. Hal itupun berhasil dilakukan, beberapa perkumpulan yang ada di Indonesia dapat dipengaruhi sehingga menyatakan tidak bekerjasama lagi dengan pemerintah Belanda, dan berdirilah juga perkumpulan-perkumpulan pelajar yang bersiat nasional.

Pelajar baik di Belanda maupun di Indonesia selalu aktif menyebarluaskan pentingnya persatuan dan kesatuan demi membentuk pemerintahan sendiri. Dari hal tersebut, muncullah pemikiran untuk menggabungkan semua perkumpulan demi mendorong tercapainya persatuan dan kesatuan. Maka, tidak lama kemudian

dilaksanakan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II sehingga teretuslah Sumpah Pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoyoadisuryo, Subardjo, Ahmad. (1977). *Peranan Ide-ide Dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Idayu Press.
- G-Martha, Ahmaddani., Wibisono, Christianto., & Anwar, Yozar. 1985. *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kurnia Esa.
- Hatta, Mohammad. (1966). *Peranan Pemuda Menuju Indonesia Merdeka, Indonesia Adil Dan Makmur*. Badung: Angkasa.
- Ingleston, John. (1983). *Jalan Ke Pengasingan Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927-1934* (Zamakhsyari Dhofier. Terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- _____. (1993). *Perhimpunan Indonesia Dan Pergerakan Kebangsaan* (Nin Bakdisoemanto. Terjemahan). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kartodirdjo, Sartono. (1999). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koch, D.M.G. (1951). *Menuju Kemerdekaan Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia Sampai 1941* (Abdoel Moeis. Terjemahan). Jakarta: Jajasan Pembangunan.
- Moedjanto, G. (2001). *Indonesia Abad Ke-20 I Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution, S. (1995). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern*. (Drs. Dharmono Hardjowidjono. Terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sudiyo. (1989). *Perhimpunan Indonesia Sampai Dengan Lahirnya Sumpah Pemuda*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. (2002). *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: Rineka Cipta.